

# **MEMBANGUN DEMOKRATISASI MELALUI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK : STUDI TERHADAP PERAN KOMISI INFORMASI PUBLIK (KIP) DALAM PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUP INSTITUSI PEMERINTAH DAERAH KALIMANTAN TENGAH**

**Ade Rian Riwandy**

## **ABSTRACT**

*This thesis research the topic of The Role of Information Commission Central Kalimantan province. Information Commissioner of Central Kalimantan is one of the institutions established by the Regional Independent Regional Head in Central Kalimantan province, has the main function of helping people resolve problems related to Public Information. This research was conducted at the Central Information Commission Kalimantan city of Palangkaraya using descriptive qualitative method. The purpose of this research is to know What is the Role of Information Commission Central Kalimantan in order to help people resolve problems related to public information in Central Kalimantan and the factors that support and hinder the performance of Central Kalimantan Information Commission in carrying out their duties and functions.*

*The results of this study explained that the Information Commissioner of Central Kalimantan as regional institutions to help resolve disputes of public information in the province of Central Kalimantan is already functioning as it should, but not Optimal. Not optimal role of the Information Commissioner of Central Kalimantan which is becoming the main problem is the lack of attention factor Provincial Government of Central Kalimantan on the existence of the Information Commission itself in Central Kalimantan. The lack of attention is evidenced by the lack of budget APBD given to sustainability and the future existence of this institution. The lack of budget to make these institutions less able to move mainly socialize existence for the people of Central Kalimantan.*

**Keywords:** Demokrasi, Informasi Publik

## **LATAR BELAKANG**

Keterbukaan Informasi Publik menjadi hal penting dalam dunia komunikasi dewasa ini. keterbukaan informasi telah menjadi isu sentral dalam pembahasan mengenai pembangunan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di mana transparansi atau keterbukaan informasi publik menjadi syarat bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Artinya, pemerintahan yang baik sudah seharusnya memberikan jaminan kepada masyarakatnya untuk bebas mendapatkan informasi publik yang sesungguhnya merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Kebebasan memperoleh informasi saat ini menjadi bahan perbincangan cukup hangat di masyarakat dan media. Untuk mengetahui atau menguji sebuah informasi masuk kategori terbuka atau tertutup, publik biasa merujuk ke Komisi Informasi Pusat (KIP) ataupun Komisi Informasi (KI) Daerah. Kehadiran Komisi Informasi Publik (KIP) menunjukkan Indonesia telah masuk dalam peringkat 20

besar dari 120 negara di dunia yang menerapkan Undang – Undang Kebebasan Informasi (*Freedom Of Information Act*). Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan cikal bakal jaminan warga Indonesia untuk diberikan kebebasan memperoleh informasi publik secara mudah, transparan dan akuntabel. Komisi Informasi sendiri merupakan lembaga mandiri yang berdiri di Kalimantan Tengah dan berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi sengketa adjudikasi nonlitigasi yang telah tertera dalam Undang-Undang. Dengan adanya Komisi Informasi tentunya diharapkan informasi publik yang mungkin masih banyak tertutupi pada akhirnya akan semakin bisa terbuka untuk masyarakat umum.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Demokrasi**

Demokrasi merupakan satu hal dan keterbukaan informasi publik merupakan hal lain. Selama lebih dari satu dasawarsa sejak berakhirnya rezim kekuasaan otoriter Orde Baru, Indonesia berubah menjadi negara demokratis. Pada level praksis, demokrasi menemukan wujud kongkretnya di lapangan politik. Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani “*demos*” dan “*kratos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

### **Definisi Peran**

Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh anda di posisi mana dalam suatu strata sosial dan sejauh mana pengaruh anda. Peran, adalah simbiosi yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian, sebab dengan peran, ada yang dirugikan dan diuntungkan. Menurut Soerjono Soekanto (2002) mendefinisikan peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

### **Definisi Keterbukaan**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata keterbukaan berasal dari “buka”, yang berarti keadan terbuka. Arti keterbukaan adalah memberi peluang pihak luar untuk masuk dan menerima berbagai hal dari luar untuk masuk. Makna keterbukaan ini dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan baik aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, ideologi, paham dan aliran maupun ekonomi.

### **Pengertian Informasi**

Informasi merupakan suatu hal yang perlu bagi kehidupan seseorang. Dengan informasi seseorang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, awalnya tidak mengerti menjadi mengerti. Sangatlah penting informasi itu untuk menambah pengetahuan atau wawasan seseorang. Sedangkan Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik yang berkaitan dengan kepentingan publik. Menurut Raymond McLeod (2001: 9) informasi adalah "data yang sudah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang".

### **Pengertian Komisi Informasi**

Komisi Informasi adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan adjudikasi nonlitigasi yang untuk pertama kalinya berkerja mulai tanggal 1 Mei 2010 berkaitan dengan akan mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis atau pendekatan Penelitian Kualitatif.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Komisi Informasi Publik (KIP) Kalimantan Tengah dan institusi Pemerintah Kalimantan Tengah tahun 2016.

### **Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dan menganalisis peran Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam membangun demokratisasi melalui pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkup institusi Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah antara lain adalah :

1. Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
2. Pemeriksaan Permohonan Sengketa Informasi.
3. Memutuskan penyelesaian sengketa Informasi publik melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi Nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dari peran Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam menciptakan keterbukaan informasi publik di lingkup Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah

### **Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 2 macam yaitu : (1) Data primer yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung

terhadap objek penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data. (2) Data Sekunder, diperoleh melalui data dari instansi atau perpustakaan maupun data-data dari lembaga yang terkait dengan Komisi Informasi.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik sebagai berikut: (1) Observasi, (2) Wawancara (3) Dokumentasi.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang didapat dalam penelitian dan mengembangkan serta menghubungkan dengan teori-teori yang melandasinya. Model analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yaitu model analisis yang menyatu dengan proses pengumpulan data yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Komisi Informasi Dalam Membangun Demokratisasi Keterbukaan Informasi Publik.**

Dalam membangun demokratisasi untuk keterbukaan informasi yang lebih baik, Komisi Informasi Provinsi memiliki beberapa peran yang telah dibuat berdasarkan UU No 14 tahun 2008 yaitu :

- a) Menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
- b) Memeriksa Permohonan Sengketa Informasi
- c) Memutuskan Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Mediasi, Ajudikasi Dan Atau Nontiligasi

Dari hasil penelitian dilapangan terlihat kinerja Komisi Informasi Provinsi sangat baik, karena menerima setiap permohonan sengketa informasi dengan terstruktur serta merata tanpa harus membedakan pemohon dan termohon yang telah melapor. Para Staff serta komisioner Komisi Informasi terlihat sigap dalam melayani serta menjalankan proses penyelesaian sengketa informasi dengan baik

Melihat perkembangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah sampai saat ini dengan berbagai faktor pendukung dan Faktor penghambat peran lembaga tersebut, memberikan gambaran kondisi lembaga tersebut saat ini. Komisi Informasi daerah Kalimantan Tengah yang sejak tahun 2011 telah terbentuk di Kalimantan Tengah menjadi satu-satunya lembaga di daerah ini yang memang secara khusus membantu masyarakat menyelesaikan masalah yang terkait dengan permasalahan informasi publik yang terjadi di Kalimantan Tengah. Komisi Informasi Kalimantan Tengah sebagai lembaga yang dapat dikatakan lembaga baru yang hadir untuk membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan informasi publik di Kalimantan Tengah saat ini masih memiliki banyak kelemahan baik dari segi internal maupun eksternal.

Kehadiran Komisi informasi Kalimantan Tengah sama halnya dengan di daerah-daerah lain di Indonesia tentu harus didukung serta diapresiasi oleh semua kalangan baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah sendiri dalam rangka menciptakan lembaga daerah yang kompeten dan memang benar-benar

dirasakan fungsinya oleh masyarakat itu sendiri. Komisi informasi Kalimantan Tengah tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya tanpa adanya kesadaran kerjasama dan dukungan yang baik antara masyarakat, pemerintah, swasta dan stakeholder terkait lainnya dengan Komisi Informasi Kalimantan Tengah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta data-data yang telah dikumpulkan terkait Peran Komisi Informasi (KIP) dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup Institusi Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah, terdapat beberapa temuan peneliti di lapangan serta dari analisis yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Membangun Demokratisasi Keterbukaan Informasi Publik yaitu :
  - a) Menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
  - b) Memeriksa Permohonan Sengketa Informasi
  - c) Memutuskan Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Mediasi, Ajudikasi Dan Atau Nontiligasi.

Sebenarnya telah efektif meski belum berperan secara maksimal., hal tersebut karena adanya faktor pendukung dan penghambat yang ada.

2. Adapun faktor penghubung dan penghambat adalah sebagai berikut :
  - a. Faktor Pendukung
    1. Bersifat Independen.
    2. Memiliki Regulasi yang jelas.
  - b. Faktor Penghambat
    1. Minimnya anggaran.
    2. Komisi Informasi sebagai lembaga baru di Kalimantan Tengah.
    3. Tingkat kesadaran mengakses informasi publik sangat rendah. Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak layak.
    4. Masih rendahnya pemahaman pejabat publik terhadap Undang-undang Keterbukaan Informasi.

Meskipun telah berperan secara baik akan tetapi masih banyak sekali kekurangan yang harus dibenahi agar keberadaan KI kalteng bisa benar – benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat di Kalimantan Tengah.

### **Saran**

1. Komisi Informasi Kalteng Harus lebih banyak melakukan sosialisasi agar keberadaannya diketahui banyak orang.
2. Sekretariat KI harus representatif karena KI selain sekretariat juga sebagai tempat siding kasus – kasus yang ditangani.
3. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan anggaran yang dikucurkan demi eksistensi KI di Kalteng.
4. Masyarakat yang sekiranya memerlukan informasi tetapi kesulitan mendapatkannya harus berani melaporkan hal tersebut ke KI Kalteng agar KI bisa menyelesaikan permasalahan mereka.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alwasilah, Chaedar. 2002. *Pokoknya Kualitatif (Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif)*. Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu sosial lainnya)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- <http://inspirasi bangsa.com/pejabat-belum-paham-keterbukaan-publik/>
- [http://www.academia.edu/7118746/DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI](http://www.academia.edu/7118746/DEMOKRASI_DAN_DEMOKRATISASI)
- Murhajanti, dkk. 2009. *Sudahkah Hak Akses Kita Terpenuhi*. Jakarta : Indonesian Center For Environmental Law (Icel).
- Rosdiansyah dan Jusmadi Rhido. *Akuntabilitas Spirit Melayani Publik Yang Kian Cerewet*, Surabaya : Jawa Pos Institute of Pro – Otonomi (JPIP).
- Sastro A Dhoho dkk. 2010. *Mengenal Undang-undang keterbukaan Informasi Publik*, Jakarta : Pelitaraya Selaras.
- Sinambela Poltak Lijan dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soerjono, Soekanto. 2002. *Teori Peran*, Jakarta Bumi Aksara.
- Zuhro Siti R dkk. 2009. *Demokrasi lokal peran aktor dalam demokratisasi*, Yogyakarta : Ombak.